

PERASAAN TERSUMBAT BISA BERBAHAYA¹

Oleh Nurcholish Madjid

Gagasan tentang perlunya partai oposisi di Indonesia, yang dilempar Nurcholish Madjid, memancing perdebatan seru di media massa. Presiden Soeharto pun angkat bicara: Di Indonesia tak perlu ada partai oposisi. Di samping memberikan argumen tentang perlunya partai oposisi, Cak Nur, panggilan akrabnya, dalam wawancara dengan Zainal Abidin dan Yadi Sastro dari Majalah *UMMAT*, juga coba menjabarkan lebih dalam tentang isi pemikirannya yang ia tuang dalam seminar Perspektif Islam dalam Indonesia Modern, 4 September 1995, di Gedung Perpustakaan Nasional.

Apa latar belakang gagasan Anda tentang perlunya partai oposisi di Indonesia?

Sebetulnya sudah lama saya berkata begitu. Sejak menjelang sidang MPR dulu. Waktu itu orang tidak menanggapi secara positif. Sekarang tanggapannya lebih positif, lebih luas.

Sebetulnya begini. Kita sudah 50 tahun merdeka dan baru punya dua presiden: Soekarno dan Soeharto. Kedua-duanya sebetulnya tidak hanya berfungsi sebagai presiden, tetapi juga sebagai Bapak Bangsa. Artinya, figur yang sangat dominan, yang boleh dikatakan

¹ Majalah *UMMAT*, "Perasaan Tersumbat bisa Berbahaya", No. 7/Thn. I, 2 Oktober 1995. Pewawancara Zainal Abidin dan Yadi Sastro.

menyelesaikan seluruh persoalan kita sebagai bangsa. *Nah*, setelah 50 tahun merdeka ini, dan dengan mengantisipasi keadaan nantinya, untuk pertama kali kita akan punya presiden yang tak lagi berfungsi sebagai Bapak Bangsa. Untuk itu perlu ada struktur. Peran presiden tidak lagi terlalu dominan, menyelesaikan semua masalah, namun ia tunduk pada suatu mekanisme atau struktur.

Kepada Pak Harto, sebagai Bapak Bangsa, sejauh ini kita insya Allah tetap percaya. Tapi, saya kira Indonesia mendatang akan menyaksikan dan akan mempunyai bentuk pemimpin yang biasa saja, yang *primus inter pares*, yang pertama dari yang sama. Jadi, sebetulnya sama dalam sederetan calon, dan ini hanya dipilih karena menonjol sedikit saja. Karena itu lembaga kepresidenan perlu kita letakkan dalam suatu mekanisme atau struktur yang memungkinkan terjadinya pengawasan dan penyeimbangan, *check and balance*.

Di negara-negara lain, misalnya Amerika Serikat, kita juga melihat perjalanan yang sama. Beberapa presiden pertamanya adalah Bapak Bangsa. Namun, setelah tahap tertentu, setelah ada stabilitas dan kebebasan-kebebasan asasi menjadi kebutuhan, yang lebih diperlukan adalah struktur yang baik. Lalu pergantian presiden setiap 4 tahun (di AS) bukan peristiwa yang luar biasa.

Apakah tahapan semacam itu kini sudah tercapai di Indonesia?

Memang di sini ada perbedaan. Soal itu agak relatif, maka orang mudah sekali untuk berbeda. Dalam pandangan saya, tahapan itu sudah tercapai. Karena apa? Proses penumbuhan bangsa ini telah berjalan dua generasi. *Pertama*, konsolidasi kebangsaan sebagai *nationstate* dengan Bung Karno sebagai tokohnya. *Kedua*, dari segi ekonomi dan pendidikan, tokohnya Pak Harto. Keduanya berhasil. Peningkatan-peningkatan ini akan berlanjut pada hal-hal prinsipil: peningkatan kemampuan secara umum, khususnya kemampuan politik. Seperti kemampuan menyatakan pendapat dan kemampuan mengartikulasikan aspirasi. Karena itu, Indonesia

sebagai akibat dari kesuksesannya ini akan semakin “ribut”, namun dalam arti positif.

Makin tahu hak dan kewajibannya juga berarti akan banyak menuntut. *Nah*, karena sekarang ini penyaluran dari proses itu belum diakui sepenuhnya, maka terjadi letupan-letupan. Sebenarnya perkataan letupan itu *majâz*, dikiaskan pada gejala alam: sesuatu disumbat bisa meletup atau meledak. Sebetulnya ada cara lain yang lebih damai, lebih tidak merusak kalau memang sengaja dibikinkan saluran. Perasaan tersumbat atau tertekan ini tidak boleh didiamkan terlalu lama, karena bisa berbahaya sekali kalau meledak, bukan sekadar meletup. Karena ini bangsa yang besar sekali. Nomor empat di dunia. Apakah bangsa yang besar ini akan kita biarkan mengalami perasaan tersumbat? Indikasinya sudah ada yaitu munculnya orang-orang yang vokal itu.

Namun bukankah saat ini juga sudah adanya saluran-saluran yang mulai dibuka? Misalnya, buruh boleh berdemonstrasi dan izin bicara mulai longgar.

Betul. Sebagai ancang-ancang, semuanya yang telah diisyaratkan oleh pemerintah itu sangat positif. Terutama yang terakhir, yang keluar melalui Soesilo Soedarman dan Oetoyo Oesman: tahun 1996 tak perlu ada izin untuk semua kegiatan politik. Itu yang kita tunggu-tunggu. Lalu, kalau semuanya telah menjadi kenyataan — semua orang telah bebas menyatakan pendapat, bebas berkumpul, dan kemudian bebas berserikat — kira-kira apa wujud yang paling nyata?

Orang akan menantang, mendirikan partai politik. Bukankah ini bagian dari kebebasan berkumpul dan berserikat? Dan nanti akan terjadi aksi-reaksi yang kuat. Karena itu maka saya bilang, manfaatkan saja PDI dan PPP. Dorong mereka menjadi partai yang secara formal dan legal menjadi partai pengontrol, pengawas dan penyeimbang. Sekarang ini *kan* canggung sekali, oposisi bukan, partai pemerintah juga bukan. Kecanggungan ini membuat mereka

tidak berfungsi. Sebetulnya dengan ini kita menolong partai-partai supaya mereka berfungsi.

Bagaimana Anda menanggapi pernyataan Pak Harto yang tegas menyatakan tak perlu ada oposisi di Indonesia?

Saya memahami itu sebagai masalah semantik saja. Pak Harto adalah orang yang terlibat langsung dalam proses pertumbuhan bangsa ini, jadi wajar kalau masih ingat dengan pengalaman-pengalaman yang sangat pahit pada tahun 50-an. Ketika itu kita porak-poranda hanya karena mau menerapkan demokrasi menurut Barat, lebih tepatnya Eropa Barat. Bukan Amerika, sebab UUD '45 itu meniru Amerika. Lima tahun pemerintahan kita sama dengan Amerika 4 tahun. Jadi, selama lima tahun itu tidak bisa dijatuhkan. Tidak seperti di Inggris, Belanda, dan sebagainya: sekarang jadi perdana menteri, besok bisa dijatuhkan.

Pada tahun 50-an begitu. Tapi sekarang tak perlu. Yang kita perlukan bukan oposisi yang menjatuhkan pemerintah, tetapi yang mengawasi dan mengontrol serta mengimbangi. Jadi ide ini tetap setia kepada UUD '45 dan Pancasila. Dengan begitu, ada gabungan yang serasi antara pemerintah yang kuat (tidak bisa dijatuhkan selama lima tahun) dan kontrol, sehingga nanti akan menjadi *clean government* — yang sekarang jadi obsesi bagi ABRI.

Tapi ini soal pengalaman saja. Sebab, bangsa Indonesia belum pernah mengalami kehidupan politik yang benar-benar dengan oposisi, kecuali tahun 50-an yang memang rusak, sehingga menjadi trauma. Dan trauma itu membayangi sampai sekarang, menjadi trauma generasi tua. Generasi muda nggak tahu lagi. Saya saja tidak begitu merasakan. Pada sudut ini saya melakukan empati memahami situasi psikologis orang seperti Pak Harto dan yang lain. Pengalamannya begitu. Tapi kita lalu menerangkan bahwa oposisi adalah istilah politik yang intinya pengawasan dan pengimbangan.

Kalau memang oposisi masih riskan karena ada trauma, tidak usah menggunakan kata “oposisi”. Intinya, koreksi. Kita memang tahu bahwa pemimpin itu selalu beriktikad baik. Tapi, karena pemimpin ini menyangkut nasib orang banyak, kita tidak boleh mempertaruhkannya hanya kepada niat baiknya, harus dikontrol. Surat *al-‘Ashr kan* begitu? *Pertama*, iman, pribadi sekali. Kemudian amal saleh. Di sini harus ada yang mengingatkan. Tidak mungkin kita berkata, “Saya sudah beriman, jadi mau berbuat baik dan percayakan saja kepada saya”. Apalagi dalam politik, yang jelas menyangkut orang banyak, harus ada *tawâshaw bi ‘l-haqq* (mekanisme pengawasan) dan *tawâshaw bi ‘l-shabr* (dengan kesabaran).

Sebetulnya, jika sebatas koreksi, bukankah sedikit banyak *check and balance* ini sudah berjalan, dan ada kelompok-kelompok penekan?

Ya, tapi ini harus berjalan secara terbuka, legal dan formal. Sekarang sudah berjalan, tapi tidak terbuka, maka terjadi letupan-letupan, dan timbul kesalahpahaman. Jika ada legalisasi, bahwa memang itu ada, diakui, dan ada kepastian peraturan, *check and balance* akan berjalan efektif. Anda sendiri dari pers pasti merasakan, betapa pers itu terkadang harus hati-hati secara tidak perlu hanya karena aturannya tak selalu jelas.

Keberatan lain, soal budaya. Sebagian orang menganggap kita tak punya kultur oposisi.

Sekarang kita tanya saja pada Muchtar Naim, budayawan dari Minangkabau, yang selalu mengontraskan antara Minang dan Jawa. Saya melihat lebih luas dari itu, soal budaya pantai (Minang) dan pedalaman (Jawa). Kalau kita jujur, ketika bahasa Melayu diterima oleh kita semuanya, maka sebetulnya kita ini menjadi kemelayuan dan jatidirinya budaya pantai, bukan pedalaman. Budaya pantai

ini lebih bergerak, *mobile*, terbuka, egaliter dan kosmopolit. Karenanya cara-cara pengambilan keputusan pun dilalui dengan ide musyawarah dan mufakat itu, yang *nota bene* diambil dari bangsa Minang. Tetapi dalam budaya Minang, mufakat itu tak harus berarti konsensus. Mufakat itu harus ada keputusan bersama, kalau perlu *voting*.

Dalam tradisi Jawa, ada juga tradisi “*mepè*”. Yaitu, rakyat berjemur di luar keraton, di bawah terik matahari, untuk menyampaikan ketidakpuasan pada penguasa. Jadi, sebetulnya ada budaya itu di sini.

Keberadaan partai oposisi menjanjikan negara yang lebih demokratis. Tapi masih ada perhitungan risiko bahwa ini akan mengarah ke anarki.

Pertama, itu belum terwujud. Boleh saja orang berspekulasi begitu. *Kedua*, kalau memang dikhawatirkan begitu, kita bisa melakukan tindakan hati-hati. Karena itu harus ada eksperimentasi terbuka. Dan karena terbuka itu akan ada benar dan salah. Misalnya, ternyata kita membuat kesalahan, lalu ada *chaos*, direm saja dan diluruskan lagi. Tapi kalau dari semula sudah takut lalu tidak mau mencoba, itu mati. Macet nanti.

Itu pula sebabnya saya menginginkan proses ini dimulai dari sekarang, ketika Pak Harto masih kuat, dan ABRI juga masih kuat. Agar jika ada kesalahan, masih ada pengendalinya. Pembukaan katup-katup ini juga tak dapat menunggu terlalu lama. Jangan sampai oposan kelewat banyak. Sebab, kalau terus-menerus disumbat, letupan akan besar. Letupan yang besar akan berarti ledakan.

Demi kepentingan demokratisasi, menurut Anda, mana yang lebih baik: ada suksesi pada 1998 atau tidak?

Ah, itu tidak relevan sama sekali. Saya berikan kiasan soal perlunya struktur dengan naik kereta api. Kita ke Surabaya naik kereta api tanpa pernah bertanya siapa masinisnya. Kita percaya betul ada rel dan di setiap stasiun ada yang mengarahkannya. Ada struktur yang membuat kita merasa aman. Siapa pun yang memimpin negara ini, tak jadi persoalan.

Ini semuanya memang untuk menyiapkan agar kita lebih mantap ketika sudah tidak dipimpin lagi oleh Bapak Bangsa. Idealnya adalah, jika Pak Harto masih tetap memimpin, kemudian beliau mengantarkan kita ke arah itu. Jadi bisa lebih mulus. Karena, cepat atau lambat, keperluan akan adanya struktur yang lebih mantap ini harus dipenuhi. ^[❖]